

**Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit II Di Desa Sumpalsak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**  
( *Implementation of Community-Based Forest Resource Management Program (PHBM) Of Perum Perhutani (State-Owned Forestry Company ) Unit II Sumpalsak Village District Of ledokombo, Jember regency* )

Dwi Bismoko, Sutomo, M. Hadi Makmur  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[E-mail: DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

**Abstract**

Hutan merupakan suatu kawasan yang penting bagi salah satu kelangsungan hidup kita. Program PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dengan prinsip berbagi hasil antara PT. Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Melalui model deskriptif dengan jenis data kualitatif, penelitian ini menetapkan informan secara sampling purposive dengan melakukan indepth interview, observasi secara langsung di lapangan, dokumentasi serta triangulasi. Sementara itu dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Keywords: Implementasi, Program PHBM, Perum Perhutani Unit II**

**Abstract**

*Forest is an important area for one of our survivals. PHBM (Community-Based Forest Management/CBFM) program is a system of forest management undertaken together with society with the main principle of profit sharing between PT. Perhutani (Persero), a state-owned forest company, forest village communities, concerned parties, so that the common interests to achieve the sustainability of forest functions and benefits of forest resources can be realized in optimally and proportionally. Through descriptive model with qualitative data, this research determined informants by purposive sampling by conducting in-depth interviews, direct observations in the field, documentation and triangulation. Meanwhile, in the process of data analysis, this research used interactive method which consisted of four components, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion.*

*Keywords: Implementation, PHBM Program, Perum Perhutani Unit II*

### Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas begitu juga dengan wilayah hutan yang dimiliki Indonesia. Hutan merupakan suatu kawasan yang penting bagi salah satu kelangsungan hidup kita. Dengan sumber daya alam yang ada di hutan di Indonesia sepatutnya kita lestarikan dan dilindungi. Diperlukan sebuah pengelolaan yang bisa menjaga dan melindungi hutan agar terhindar dari kerusakan dan penjarahan yang tidak kita inginkan.

Hutan merupakan paru-paru dunia tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia.

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung.

Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air serta pencegahan erosi.

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 10 ayat (2) “pengurusan hutan sebagai mana yang di maksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan kehutanan
- c. Penelitaan, pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan.

Kebijakan implementasi program PHBM mempunyai dasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2005 Tentang Perberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka sosial forestry.

Yang menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutan yang berdaya guna dan berhasil duna bagi masyarrakat.

Sedangkan yang bertugas dalam pengelolaan hutan secara umum adalah Perum Perhutani.

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Kehutanan dan Kementrian BUMN.

Perhutani di dirikan berdasarkan PP No: 15 tahun 1972, kemudian diperbaharui dengan PP No. 2 tahun 1978. Pada tahun 2001 dengan PP No. 14 tahun 2001 Perum Perhutani diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan pada tahun 2003 dengan PP No. 30 tahun 2003, Pemerintah mengembalikan bentuk badan hukum

Perhutani dari Perseroan Terbatas (PT) Perhutani, berubah kembali menjadi Perum Perhutani.

Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat oleh Menteri Kehutanan untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan memperdulikan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Tabel 1.1 Data Pencurian Kayu Di BKPH Sempolan

LAPORAN KEJADIAN PENCURIAN KAYU DI BKPH SEMPOLAN				
N	NAMA	JENIS	TAHU	Jumlah/ /
O	LMDH	KAYU	N	Volume 400 meter/ kubik
1	WANA MANDIRI ARTHA	MAHON I	2007	600 meter/ kubik
2	WANA MULYA	MAHON I	2007	700 meter/ kubik
3	WANA ASRI	PINUS	2007	300 meter/ kubik
1	WANA MANDIRI ARTHA	MAHON I	2008	300 meter/ kubik
2	WANA MULYA	MAHON I	2008	700 meter/ kubik
3	WANA ASRI	PINUS	2008	meter/ kubik

Sumber : Arsip BKPH Sempolan tahun 2012

Dilihat dari data tabel 1.1 Data Pencurian Kayu Di BKPH Sempolan di atas sudah membuktikan bahwa di LMDH Wana Asri Sumbersalak banyak terjadi pencurian Kayu. Kayu yang di curi yakni bagian dari tanaman pokok dari LMDH Wana Asri yaitu kayu Pinus. Pencurian di LMDH Wana Asri dilatar belakangi oleh beberapa faktor salah satunya kurangnya sosialisasi program PHBM dan kebutuhan manusia yang tak pernah terpuaskan sehingga bisa seenaknya mencuri kayu di dalam kawasan hutan. Tidak menutup

kemungkinan pencurian kayu tersebut di komandoi oleh seorang petugas internal sendiri. Jika perbuatan seperti itu terus menerus dilakukan maka akan terjadi sebuah bencana lagi di Desa Sumpalsak.

Peneliti melaksanakan penelitian di LMDH wana asri Desa Sumpalsak dengan alasan bahwa dikawasan LMDH wana asri khususnya Desa Sumpalsak merupakan wilayah dengan tingkat sumberdaya alam yang memadai serta diketahui pengurus-pengurus di LMDH tersebut mempunyai latar belakang sumberdaya manusia yang relatif jika dibanding dengan LMDH lainnya. Menurut Bapak Gunawan pada wawancara tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.00 WIB

“Dilihat dari penghasilan perhari penyadap pinus masyarakat Desa Sumpalsak yaitu rata-rata Rp. 30.000 perhari dibanding dengan warga Desa Sumberjati yakni bisa mencapai Rp. 55.000 perhari.”

Dengan kondisi seperti itu masih saja ditemukan bahwa kondisi hutan serta perekonomian masyarakatnya belum tercukupi.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Kebijakan

Sebagaimana dikutip Winarno (2009:17) Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selanjutnya kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (2009:18), yaitu “merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Sedangkan dalam pendapatnya yang lain, Anderson (dalam Widodo, 2006: 13) mengatakan bahwa “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”.

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dikutip oleh Subarsono (2005:13), menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

#### Konsep Implementasi Program PHBM

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

#### Model-model Implementasi

Adapun model implementasi menurut Van Meter dan van horn (1975), adalah dengan mengikuti beberapa langkah berikut.

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana / implementator
3. Kondisi sosial, ekonomi, politik.
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana / implementator”

Sedangkan menurut Grindle yang dikemukakan oleh Wibawa (1994:22) model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.



3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.
- 4.

Model ini terlihat aneh karena model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang terjadi diantara para aktor implementasi.

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model George Edward III karena secara teknis ruang lingkup yang kecil dalam pelaksanaan program PHBM. Menurut Edward dalam Nugroho (2008:447) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber, disposisi, dan struktur birokrasi.

### Konsep Pembangunan Masyarakat

Menurut Korten (1988:381) salah satu tantangan yang penting bagi pembangunan yang berpusat pada masyarakat adalah mengubah orientasi birokrasi pembangunan dari pemerintah agar menjadi organisasi-organisasi yang menghargai dan memperkuat kerakyatan anggota mereka maupun para warga negara yang harus dilayaninya. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi perencanaan suatu pembangunan tetapi juga melaksanakan pembangunan itu sendiri, terutama pada negara-negara berkembang. Seperti diketahui masyarakat dari Negara tersebut memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah di samping berpenghasilan rendah. Keadaan demikian sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu menjadi sangat terbatas sesuai dengan kemampuannya.

### Konsep Kemitraan

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra yang dimaksud bekerjasama dalam hal ini adalah antara Perum Perhutani dengan masyarakat yang ada di desa

hutan. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan yang sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya

### Metode Penelitian

Penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan data deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah pada hasil pelaksanaan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Desa Hutan (MDH) Wana Asri Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Pada penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive* (sample bertujuan) dan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2008:85), "sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut adalah orang – orang yang dianggap ahli dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga peneliti akan mudah untuk menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai narasumber dan diwawancarai sebagai berikut:

1. Bapak Mat Sudik, selaku kepala Seksi PHBM perum Perhutani Jember.
2. Bapak Agus Setioko S.P selaku kepala area BKPH/ Asper Sempolan.
3. Bapak Gunawan Wibisono selaku Ketua LMDH Wana Asri Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
4. Anggota dan staf dari LMDH Wana Asri Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Masyarakat desa hutan Desa Sumpalsak.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Primer
- b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan

model analisis interaktif (Interaktive Model Analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005:91) dimana dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

### Hasil Penelitian

Program pengolahan Hutan bersama Masyarakat ini dikembangkan ke tiga arah. Pertama kelola kelembagaan, kedua kelola SDH (Sumber Daya Hutan), ketiga kelola usaha (membentuk koperasi, usaha produktif, komoditas unggulan). Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan pada arah yang kedua dan ketiga, yaitu kelola Sumber Daya Hutan dan kelola usaha.

#### Terbentuknya Kelembagaan PHBM

Kelembagaan berarti suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan kata berupa norma, kode etika aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

(Yang di akses pada <http://www.scribd.com/doc/32572019/3/Pengertian-Kelembagaan> 19.15 tgl 19 03 2013).

Kelembagaan yang dibangun dalam program PHBM ini dimaksudkan agar masyarakat desa hutan bisa mengikuti aturan main dari adanya LMDH yang dibangun oleh Perhutani. Aturan main yang diberlakukan oleh LMDH seperti perubahan pola pikir yang awalnya masyarakat sembarangan menebang pohon kini dengan adanya LMDH dapat mengikuti aturan dari lembaga misalnya untuk tidak menebang pohon tanpa ada surat perintah untuk tebang dari Perhutani. Selain itu, LMDH juga turut berperan dalam menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. Harapan bagi masyarakat dengan adanya LMDH yaitu bisa bekerja sama dengan Perhutani untuk menjaga dan melestarikan hutan yang ada di Desa Sumpalsak. Selain itu, LMDH mempunyai cara dengan menanam pohon pinus sebagai tanaman pokok di kawasan Hutan Produksi tanpa ada tanaman lainnya. Untuk menanam tanaman sampingan masyarakat bisa menanam di kawasan Hutan Suaka Alam dan Lindung yakni menanam pohon sengon, mahoni, kopi, dan lain – lain.

Pada awal membentuknya LMDH dengan melibatkan semua masyarakat desa hutan tidaklah gampang karena membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai pelaku terhadap Perum perhutani dan Pemerintahan Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh semua pelaku merupakan salah satu cara untuk melaksanakan program yang dicanangkan oleh Perhutani. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Gunawan (Ketua LMDH Wana Asri Sumpalsak), pada hari Jum'at 12 September 2012 pukul 09.00-10.30 WIB), beliau mengemukakan bahwa :

“Jadi awalnya masyarakat kurang setuju lahan yang di berikan oleh Perhutani nantinya akan di tanami pohon pinus karena pesanggem beranggapan kurang bisa merasakan hasil dan manfaatnya nantinya. Tetapi dengan member pemahaman yang kuat dan mendekati masyarakat desa hutan LMDH berupaya untuk menanam pohon pinus dengan maksud bisa menjaga kelestarian hutan dan mencegah bahaya longsor”.

Dalam kriteria ini penulis lebih menekankan pada bidang sumberdaya yang dimiliki oleh Hutan di desa Sumpalsak yang nantinya bisa bermanfaat nilai ekonominya. Di dalam hutan terdapat banyak sekali sumberdaya alam yang bisa dikelola masyarakat melalui LMDH Wana Asri dengan mengikuti aturan-aturan yang di berlakukan oleh Perhutani. Pada desa Sumpalsak ini melalui LMDH Wana Asri masyarakat atau petani diwajibkan untuk menanam tanaman pokok yaitu pohon Pinus. Karena nantinya akan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-hari dengan cara diambil getahnya setiap harinya dandisetorkan pada Perhutani tiap 2 (dua) minggu sekali. Lahan garapan yang dikerjakan oleh LMDH Wana Asri adalah hutan produksi. Dengan luas daerah garapan 1241 Ha. Sedangkan jumlah bibit yang diberikan perhutani kepada LMDH sebanyak 10.000 Bibit/Ha berupa bibit pinus.

Seiring dengan Misi dari program PHBM yang berbunyi “Memberdayakan sumberdaya manusia, perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian”. Dalam perubahan tingkat ekonomi masyarakat melalui LMDH yang nantinya akan mendapatkan hasil yang di inginkan oleh masyarakat sumpalsak. Seharusnya program PHBM mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat desa hutan yang ada di desa Sumpalsak terutama dalam sub bab ini, apakah sudah dirasa bagi semua masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH Wana Asri. Dalam hal ini penulis jelaskan hasil yang di dapat melalui dana sharing (bagi hasil) dan pengelolaan lahan yang diberikan Perhutani melalui LMDH.

### Kesimpulan dan Saran

1. Pelaksanaan program PHBM di Desa Sumbersalak mempunyai komitmen yang sangat jelas yaitu dengan Petugas internal yang terdiri dari Petugas lapangan (mandor) Sumbersalak, KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Sumbersalak, BKPH/ AsPer Sempolan, beserta masyarakat Desa Sumbersalak yang tergabung dalam LMDH Wana Asri. Dengan adanya komitmen yang di badan hukum kan melalui notaries yang di biayai oleh Perum Perhutani.
2. Pada awal membentuknya LMDH dengan melibatkan semua masyarakat desa hutan tidaklah gampang karena membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai pelaku terhadap Perum perhutani dan Pemerintahan Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas internal merupakan salah satu cara untuk melaksanakan program yang dicanangkan oleh Perum Perhutani.
3. Hasil Pelaksanaan Program Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di LMDH Wana Asri Sumbersalak ini dikembangkan ke tiga arah, yakni:
  - a. Kelola Kelembagaan  
Kelembagaan yang dibangun dalam program PHBM ini dimaksudkan agar masyarakat desa hutan bisa mengikuti aturan main dari adanya LMDH yang dibangun oleh Perhutani. Aturan main yang diberlakukan oleh LMDH seperti perubahan pola pikir yang awalnya masyarakat sembarangan menebang pohon kini dengan adanya LMDH dapat mengikuti aturan dari lembaga misalnya untuk tidak menebang pohon tanpa ada surat perintah untuk tebang dari Pehutani.
  - b. Kedua Kelola SDH (Sumber Daya Hutan)  
Di dalam hutan terdapat banyak sekali sumberdaya alam yang bisa dikelola masyarakat melalui LMDH Wana Asri dengan mengikuti aturan-aturan yang di berlakukan oleh Perhutani. Pada desa Sumbersalak ini melalui LMDH Wana Asri masyarakat atau petani diwajibkan untuk menanam tanaman pokok yaitu pohon Pinus. Karena nantinya akan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-hari dengan cara diambil

getahnya setiap harinya dandisetorkan pada Perhutani tiap 2 (dua) minggu sekali

c. Ketiga Kelola Usaha (membentuk koperasi, usaha produktif, komoditas unggulan).

Hasil dana sharing dari Perhutani ke LMDH dengan diwujudkan menjadi ternak kambing dan pembentukan koperasi. Selain itu untuk dijadikan kas atau tabungan LMDH untuk mengembangkan usaha-usaha lain di luar kawasan hutan guna menjadikan masyarakat sejahtera namun pada kenyataannya masih belum berjalan dengan lancar di LMDH Wana Asri.

### Saran

1. Komitmen yang beri oleh Perum Perhutani hendaknya bisa dijadikan pedoman sebagai kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan.
2. Kelola kelembagaan yang dilakukan oleh LMDH Wana Asri supaya lebih transparan karena organisasi ini bersifat sosial dan tidak ada unsur kekeluargaan.
3. Kelola sumberdaya yang di hasilkan oleh Program PHBM masih berkuat di tanaman pokok saja. Untuk tanaman sampingan misalnya bisa memakai pohon karet.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Freeman dan Rossi. 2004. *Evaluation: a systematic approach*. London: Sage publication, Inc.
- Korten C, David. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik : Teory Dan Proses*. Yokyakarta: Media Presindo
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teory Dan Proses*. Yokyakarta: Media Presindo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Teguh, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo



Dwi Bismoko et al. *Implementation of Community-Based Forest Resource Management Program (PHBM) of Perum. Perhutani (State-Owned Forestry Company) Unit II Summersalak Village, District of Ledokombo, Jember Regency*

Widodo, J. 2006. *Analisis kebijakan Publik : Konsep Dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publising

### **Skripsi**

Sandra, V. 2011. "Evaluasi Program Kemitraan PT. PLN (PERSERO) Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Banyuwangi Dengan Usaha Kecil Mitra Binaan Tahun 2010 di Kabupaten Banyuwangi

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 10 ayat (2).

Keputusan Direksi Perum Perhutani. Nomor : 682/KPTS/DIR/2009. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani

### **Website**

<http://www.scribd.com/doc/32572019/3/Pengertian-Kelembagaan-19.15> tgl 19 03 2013)

